

Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam Penanganan Covid-19 sebagai Ibu Kota Republik Indonesia

Rika Risalam Mahdur¹, Zakyta Pangestiara Gunarso¹, Eko Aprizon Nanda¹,
Wahyu Sulistiadi²

¹SI Ekstensi Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

²Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Indonesia

Abstrak

Latar Belakang: DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia. Pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta menjadi cerminan bagaimana negara ini dalam menghadapi pandemi Covid-19. DKI Jakarta juga menjadi provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur berdasarkan pada database yang berasal dari Google Scholar, infografis, dan publikasi resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pencarian jurnal-jurnal diperoleh menggunakan kata kunci "Kebijakan AND Penanganan Covid-19 AND DKI Jakarta". Data yang didapatkan selanjutnya dikhususkan dari tahun 2020 hingga tahun 2021.

Hasil: Berbagai kebijakan telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mulai tanggal 11 maret 2020 meniadakan car free day, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Kesimpulan: Kebijakan yang ditetapkan belum berhasil menangani Covid-19 karena ketidakpatuhan masyarakat serta lemahnya koordinasi antar pemerintah pusat maupun daerah. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama berbagai pihak termasuk masyarakat serta menerapkan tata kelola yang baik agar terjadi koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga mampu menangani pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, DKI Jakarta, Kebijakan pemerintah, PPKM, PSBB

DKI Jakarta Government Policy in Handling Covid-19 as the Capital of the Republic of Indonesia

Abstract

Background: DKI Jakarta is the capital city of Indonesia. The implementation of the Covid-19 handling policy in DKI Jakarta is a reflection of how the country is dealing with the Covid-19 pandemic. DKI Jakarta is also the province in Indonesia that has the highest number of Covid-19 cases in Indonesia.

Method: A literature review was done based on a database from Google Scholar, infographics, and official publications from the DKI Jakarta Provincial Government. The search for journals was obtained using the keyword "Kebijakan AND Penanganan Covid-19 AND DKI Jakarta". The data obtained is then specified from 2020 to 2021.

Result: Various policies have been set by the DKI Jakarta Provincial Government. Starting on March 11, 2020, eliminating car free days, large-scale social restrictions (or PSBB in Bahasa Indonesia), to Micro-Based Community Restrictions (or PPKM Mikro in Bahasa Indonesia).

Conclusion: The policies that have been set have not succeeded in dealing with Covid-19 due to community disobedience and weak coordination between the central and regional governments. Therefore, it is necessary to cooperate with various parties including the community and implement good governance so that policy coordination occurs between the central and regional governments so that they are able to handle the Covid-19 pandemic.

Keywords: Covid-19, DKI Jakarta, Government policies, PPKM, PSBB

Korespondensi: Rika Risalam Mahdur
Email: nkanisalanm@gmail.com

PENDAHULUAN

Covid-19 sudah setahun lebih merupakan permasalahan kesehatan yang diderita oleh hampir semua negara. Pada tanggal 1 Juli 2021 jumlah kasus terkonfirmasi secara global mencapai 181.948.168 kasus dengan 3.946.201 kematian.¹ Di Indonesia sendiri kasus terkonfirmasi sudah mencapai 2.203.108 kasus dengan 58.995 kematian. Tiga wilayah yang memiliki jumlah kasus tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, serta Provinsi Jawa Tengah.²

Pertambahan kasus yang terus meningkat memerlukan penanganan yang optimal untuk menghentikan laju penularan Covid-19. Saat ini Pemerintah Indonesia terus berupaya membuat kebijakan demi kebijakan guna mempercepat penanganan Covid-19. Kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan, kebijakan tersebut merupakan adaptasi dari lockdown dimana semua aktivitas masyarakat dibatasi melalui imbauan untuk selalu berada di dalam rumah masing-masing, kecuali untuk kegiatan esensial atau mendesak. Selain itu, mobilisasi transportasi umum dan pribadi juga dikontrol. Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan sesuai dengan tingkat keparahan penularan dan kasus Covid-19 di suatu wilayah. Kebijakan ini pertama kali diterapkan di Provinsi DKI Jakarta bulan April 2020 dengan periode selama 2 minggu dan dapat diperpanjang.³

Sebuah analisis yang dilakukan oleh Irwandy menjelaskan bahwa determinasi dari belum berhasilnya kebijakan di Indonesia dalam penanganan Covid-19 karena visi misi yang tidak sejalan antara pemerintah dengan masyarakat, strategi yang reaktif dan kurang jelas antara pusat dan daerah, dan kebijakan pembatasan yang tidak didukung dengan tracing yang optimal.⁴ DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia. Pelaksanaan kebijakan dalam menangani Covid-19 di DKI Jakarta kemudian membentuk cerminan bagaimana negara ini dalam menghadapi pandemi Covid-19. DKI Jakarta juga menjadi provinsi yang tertinggi berdasarkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana penetapan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam penanganan pandemi Covid-19.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur berdasarkan pada database yang berasal dari *Google Scholar* serta infografis dan publikasi resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pencarian jurnal-jurnal diperoleh menggunakan kata kunci "Kebijakan AND Penanganan Covid-19 AND DKI Jakarta". Data yang didapatkan selanjutnya dikhususkan dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Kemudian didapatkan jurnal seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Jurnal

No	Penulis	Jurnal
1	Zahrotunnimah	Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia
2	Hikmahwati dkk	<i>Impact Analysis of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) Policy Implementation in Jakarta</i>
3	Pardiyanto	Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Wabah Covid 19
4	Prabowo	Ibukota DKI Jakarta Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19
5	Saputra & Salma	Dampak PSBB dan PSBB Transisi di DKI Jakarta dalam Pengendalian COVID-19
6	Pangaribuan	Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19

Enam jurnal tersebut dipilih sebagai gambaran kebijakan pemerintah daerah di Indonesia dalam penanganan Covid-19.

HASIL

Beberapa kebijakan pemerintah DKI Jakarta:

1. Gubernur DKI Jakarta menghilangkan hari bebas dari kendaraan pada 11 Maret 2020 serta memerintahkan pada staf Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki gejala Covid-19 agar melaporkan segera kondisinya. Penyelenggaraan Formula E yang rencananya akan diadakan di Monas pada bulan Juni 2020 juga ditunda. Gubernur juga menghimbau agar

- membatasi kontak fisik melalui penerapan *social distancing*.⁵
2. Pemerintah provinsi mengadakan rapat internal pada 19 Maret 2020 di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Gubernur memerintahkan kepada Walikota, Camat, dan lurah agar melarang masyarakat keluar dari wilayah Kota Jakarta selama 3 minggu kemudian kepada masyarakat di masing-masing wilayahnya dan menyampaikan dengan tegas mengenai pencegahan penyebaran virus Covid-19 agar tidak semakin meluas dengan tetap berada di rumah dan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk bela negara.⁵
 3. Pada tanggal 9 April 2020 dikeluarkannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (Pergub) Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 mengenai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pertama kalinya di tanggal 10 April 2020 hingga 23 April 2020.⁶ Saat pelaksanaannya hanya diizinkan 11 sektor untuk beroperasi selama PSBB yaitu kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari.⁷
 4. Perpanjangan implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 24 April hingga 22 Mei 2020 selama 28 hari dan 24 Mei hingga 4 Juni 2020 selama 14 hari.⁸
 5. Kebijakan PSBB transisi sebanyak lima kali mulai awal juni 2020 sampai 10 september 2020.⁹ Pada saat PSBB transisi beberapa sektor selain sebelas (11) sektor yang sudah ditetapkan untuk diijinkan tetap beroperasi di antaranya sektor perkantoran, tempat ibadah, taman-taman hiburan, lokasi wisata, dan mall dengan maksimal 50% kapasitas.¹⁰
 6. PSBB diberlakukan kembali pada tanggal 14 september 2020 sampai 11 oktober 2020. Hal ini dilakukan karena tingkat okupasi sarana yang digunakan isolasi untuk penderita Covid-19 mencapai 77%.¹¹
 7. Pada tanggal 12 Oktober 2020-8 Februari 2021: Kembali ke PSBB Transisi. Hal ini karena terlihat adanya pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif meski masih terjadi peningkatan penularan.¹¹
 8. 9 Februari 2021 diberlakukan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021.¹² Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro ini dilaksanakan hingga 5 Juli 2021. Pada periode PPKM 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021 terjadi penyesuaian kapasitas yaitu perkantoran menjadi 75% *work from home* dan restoran menjadi 25% .¹³

PEMBAHASAN

Berbagai kebijakan telah diterapkan di DKI Jakarta. Menurut Tuwu, kebijakan adalah suatu ketetapan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan spesifik yang dibuat secara terencana dan konsisten.¹⁴ Pemimpin publik (*public leaders*) harus dapat mengembangkan kebijakan agar dapat memenuhi pencapaian "*common good*". Salah satunya penerapan PSBB atau PPKM. Untuk melakukan kebijakan ini, adanya persetujuan dari pemerintah pusat harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Selain itu daerah-daerah yang akan melakukan kebijakan ini juga harus memenuhi syarat terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di daerahnya.

Berdasarkan penelitian Pangaribuan mengemukakan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta masih belum berhasil dalam penanganan Covid-19 akibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah. Selain itu faktor yang mendukung kebijakan ini belum berhasil adalah koordinasi yang lemah di antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang kemudian mengakibatkan timbulnya ketidaksesuaian langkah-langkah strategis dalam penanganan Covid-19 dan menimbulkan kebingungan masyarakat dalam memahami situasi pandemi.⁸ Seharusnya kebijakan yang ditetapkan baik

oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat harus berorientasi pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Dachi bahwa kebijakan kesehatan harus berpihak kepada masyarakat karena masyarakat paling mudah terkena masalah kesehatan dan memiliki efek atau tujuan panjang ke depan.¹⁵

Penerapan PSBB atau PPKM ini juga termasuk implementasi dari rekomendasi WHO terkait kebijakan kesehatan penanganan Covid-19 di Indonesia yaitu pilihan *containment* di antaranya meliburkan kegiatan sekolah, membatalkan kegiatan pertemuan dalam jumlah besar.¹⁶ Meskipun belum cukup berhasil, pelaksanaan PSBB awal menurut penelitian Hikmawati, Sangadji, dan Utami menunjukkan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti kebijakan dan dampak pemberlakuan PSBB dapat dilihat dari nilai Angka Reproduksi (Rt) yang menurun dari mendekati 4 menjadi 0,99.⁶

Masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia maupun Jakarta sebagai ibukota merupakan pertanda belum berjalannya upaya pencegahan dengan baik. Selain itu, menurut Agustino terjadi ketidakmampuan dalam menanggapi permasalahan yang ada, hal tersebut diakibatkan karena kurang kuatnya birokrasi, struktur birokrasi, dan disposisi yang tidak tanggap terhadap berbagai permasalahan kesehatan seperti pandemi. Kurang kuatnya koordinasi di antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi masalah yang selalu muncul.¹⁷ Hal ini menandakan terjadi krisis kebijakan dan manajemen dalam menangani wabah Covid-19.

Covid-19 ini secara nyata memunculkan krisis kebijakan dan krisis tata kelola dalam menghadapi situasi pandemi. Sejumlah hal penting yang dapat dilakukan untuk membangun sistem kebijakan dan tata kelola pandemi Covid-19 baik pemerintah pusat maupun daerah di antaranya:¹⁸

1. Kebijakan yang bersifat tunggal. Fondasinya dengan nilai kemanusiaan serta memobilisasi sumber daya yang tersedia sehingga kebijakan akan bersifat komprehensif mulai dari tanggap menangani efek ekonomi dan sosial maupun model kesiapsiagaan.
2. Kepemimpinan yang tangguh, berani untuk mengambil risiko yang dilakukan secara terukur dan komunikasi publik secara efektif.

3. Kelembagaan dan koordinasi dalam menangani Covid-19 tidak hanya dalam pemerintahan, tetapi juga multisektor dan masyarakat.
4. Ketersediaan dan kapasitas mobilisasi sumber daya yang dimiliki.
5. Komunikasi efektif yang dilakukan antara pusat dan daerah sangat diperlukan terutama dalam pembuatan sebuah kebijakan di tengah pandemi ini. Komando yang satu suara akan mempermudah implementasi kebijakan penanganan Covid-19.

KESIMPULAN

Berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia telah dilakukan. Kebijakan yang diterapkan belum dapat menangani kejadian Covid-19. Diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk menyukseskan upaya yang dilakukan pemerintah. Tata kelola yang baik dalam penanganan Covid-19 sangat diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan dapat dijalankan. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan kebijakan yang bersifat tunggal, kepemimpinan yang kuat serta berani mengambil risiko dengan terukur dan komunikasi publik yang baik, kelembagaan dan koordinasi antar multisektor, serta memastikan ketersediaan dan kapasitas mobilisasi sumber daya yang dimiliki. Koordinasi yang terjalin di antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bagus ini akan menciptakan kebijakan yang terarah. Selain tata kelola, peran masyarakat dalam mematuhi kebijakan ini juga memiliki dampak yang sangat besar. Dengan terciptanya tata kelola yang baik ditengah krisis ini akan mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat menangani Covid-19 secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

1. WHO. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data [Internet]. 2021 [cited 2021 Jul 2]. Available from: <https://covid19.who.int/>
2. Kementerian Kesehatan RI. Peta Sebaran COVID-19. Covid19.go.id [Internet]. 2021 [cited 2021 Jul 2]. Available from:

- <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>
3. Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Kebijakan PSBB di Wilayah DKI Jakarta Mulai 14 September 2020 - Regulasi. Covid19.go.id [Internet]. 2020 [cited 2021 Jul 2]. Available from: <https://covid19.go.id/p/regulasi/kebijakan-psbb-di-wilayah-dki-jakarta-mulai-14september-2020>
 4. Wibawa SW. Setahun Pandemi Corona, 3 Alasan Kebijakan Pengendalian Covid-19 Gagal Total Halaman 3 - Kompas.com [Internet]. Kompas. 2021 [cited 2021 Jul 2]. Available from: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/02/163200023/setahun-pandemi-corona-3-alasan-kebijakan-pengendalian-Covid-19-gagal?page=3>
 5. Zahrotunnimah Z. Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. Salam J Sos dan Budaya Syari. 2020;7(3):247–60.
 6. Syafri H, Sangadji E, Utami RRM. Impact Analysis of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) Policy Implementation in Jakarta. J Indones Heal Policy Adm. 2020;5(2):57–60.
 7. Pardiyanto MA. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Wabah Covid 19. Spektrum. 2020;17, No 2(2):23–17.
 8. Pangaribuan MT. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. J Ilmu Pemerintah. 2021;14(1):1–9.
 9. Saputra H, Salma N. Dampak PSBB dan PSBB Transisi di DKI Jakarta dalam Pengendalian COVID-19. Media Kesehat Masy Indones [Internet]. 2020 Sep 30 [cited 2021 Jul 1];16(3):282–92. Available from: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/view/11042>
 10. Jakarta PPD. PSBB Transisi [Internet]. 2020. p. 1–6. Available from: <https://corona.jakarta.go.id/storage/info-graphic/image/panduan-umum-psbb-transisi-1-5ee3aad3a252.jpeg>
 11. Hari Prabowo C. Ibukota DKI Jakarta Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. J Syntax Admiration [Internet]. 2021 Jan 23 [cited 2021 Jul 1];2(1):38–48. Available from: <http://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/172/248>
 12. Jakarta PPD. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2021 [Internet]. 2021 [cited 2021 Jul 2]. Available from: https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk-hukum_detail/10654
 13. Jakarta PPD. PPKM Mikro DKI Jakarta. 2021;(14):1–7. Available from: <https://corona.jakarta.go.id/storage/info-graphic/image/penyesuaian-ppkm-mikro-dki-jakarta-1-60d30bb625a11.jpeg>
 14. Tuwu D. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. J Publicuho [Internet]. 2020 Jul 3 [cited 2021 Jul 2];3(2):267. Available from: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>
 15. Dachi RA. Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual) - Google Books [Internet]. Yogyakarta: Deepublish; 2017 [cited 2021 Jul 2]. Available from: https://www.google.co.id/books/edition/Proses_dan_Analisis_Kebijakan_Kesehatan/NINBDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dachi+proses+analisis+kebijakan+kesehatan&printsec=frontcover
 16. Haliem B. WHO rekomendasikan Indonesia lakukan delapan tindakan hadapi virus corona Covid-19. 2020 Mar 13 [cited 2021 Jul 2]; Available from: <https://nasional.kontan.co.id/news/who-rekomendasikan-indonesia-lakukan-delapan-tindakan-menghadapi-virus-corona>
 17. Agustino L. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. J Borneo Adm [Internet]. 2020 Aug 24 [cited 2021 Jul 2];16(2):253–70. Available from:

<https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/685>

18. Mas'uid W, Winanti PS. Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia:

Kajian Awal. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2020. 283 p.